

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber data dengan jenis data sekunder yang Dimana dalam setiap penelitian digunakan oleh peneliti untuk bahan rujukan yang nantinya akan diperoleh berupa keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga dijadikan sebagai acuan oleh para peneliti, penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk Menyusun kerangka teori serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti dalam menunjukkan kejadian sebenarnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Angkawijaya, 2019) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “Model *Collaborative Governance* dalam Implementasi Program *Quick Wins* Bidang Lalu Lintas di Kota Bandung”. Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to face dialogue* Dimana dalam jurnal ini praktek tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi yang membahas tentang strategi POLRI untuk membuat rencana strategis dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas. Praktek kolaborasi selanjutnya ada *Trust building* yang mana dalam jurnal penelitian ini dilakukan dengan saling memahami kebijakan Presiden RI tentang NAWACITA yang dituangkan dalam Renstra Polri 2015/2019 melalui strategi *Strive of excellent* “menuju POLRI yang “Promoter” telah mengeluarkan rencana aksi 8 program *quick wins* dan dan 2 (dua) dari program *quick wins*. *Commitment to process* dalam jurnal ini dilakukan dengan saling bekerjasama antar pihak terkait seperti Polantas untuk saling membantu dalam menjaga lalu lintas. *Shared understanding* dalam penelitian ini para stakeholder terkait berpartisipasi terhadap berjalannya program untuk memperbaiki lalu lintas dan menilai bahwa telah dilakukan dengan baik namun kurang efektif, sehingga perlu adanya perbaikan Kembali dalam kebijakan ataupun proses. *Intermediate outcomes* dalam penelitian ini dilakukan dengan adanya peran dari badan publik untuk menghadiri forum, organisasi pemerintah dan non pemerintah untuk ikut andil dalam pengambilan kebijakan.

Kemudian penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Bila & Saputra, 2019) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “*Collborative Governance* dalam Pemerintahan”. Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to face dialogue* dalam penelitian ini kolaborasi dalam pemerintahan dilakukan dengan membangun kepercayaan dan memiliki komitmen terhadap suatu proses serta memahami bersama untuk memperoleh hasil. Praktek kolaborasi selanjutnya ada *Trust building* yang mana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa praktek ini dilakukan dalam kolaborasi pemerintahan bersama dengan stakeholders terkait bertujuan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi telah dilakukan oleh pihak terkait . *Commitment to process* dalam jurnal ini dijelaskan bahwa komitmen yang sudah terjalin antara seluruh pihak tidak harus memihak pada satu stakeholder saja melainkan dalam kolaborasi dapat memihak yang lainnya, hal ini yang mengakibatkan kolaborasi dapat menguntungkan semua pihak. *Shared understanding* dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam melakukan kolaborasi harus memiliki kemudahan dalam mengakses informasi bagi para stakeholders adanya perlindungan privasi dan adanya pembatasan akses maka bagi yang tidak melaksanakan kolaborasi tidak mudah untuk mengakses informasi, sehingga ditekankan bahwa kemudahan akses informasi yang jelas dan mudah mengakses informasi dapat menguntungkan setiap anggota kolaborasi. *Intermediate outcomes* pada penelitian ini dijelaskan bahwa kolaborasi yang dijalin oleh pemerintah dengan pihak terkait harus menghasilkan ketersediaan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan Kerjasama yang dilakukan.

Sedangkan Penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “*Collborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)”. Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to face dialogue* dilakukan dengan menjalin Kerjasama dengan beberapa

pihak terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mana dalam pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait membahas tentang pengendalian pendamaran udara di Kota Surabaya. Praktek kolaborasi selanjutnya ada *Trust building* yaitu membangun kepercayaan yang mana dalam jurnal penelitian keterlibatan yang ada dalam forum kolaborasi untuk mengendalikan pencemaran udara masih dikatakan kurang, sehingga kepercayaan yang terbangun dalam setiap masing-masing lembaga atau individu belum baik . *Commitment to process* dalam jurnal ini dilakukan dengan membangun sebuah komitmen dengan melakukan tiga tata cara yaitu *Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies for Influence, dan Planning Collaborative Actions*, namun tiga tahapan itu juga masih belum dilaksanakan dengan efektif. *Shared understanding* dalam penelitian ini adalah pemahaman bersama antar stakeholder terdapat sebuah hambatan yang berasal dari keterlibatan aktor yang tidak semua bisa menghadiri forum sehingga tidak semua visi dan misi dari setiap stakeholders tersampaikan dan dipahami oleh lainnya. *Intermediate outcomes* dalam penelitian ini adalah tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya telah terpenuhi hanya bagian *Trust Among The Participants* yang artinya dalam pada hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa dalam sebuah proses kolaborasi belum dilakukan sepenuhnya secara efektif.

Selanjutnya Penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Danastry et al., 2021) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan *Fixed Broadband* di Indonesia”. Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to face dialogue* dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin bersama dengan pihak terkait dari pemerintah pusat seperti kementerian yang terlibat dan memiliki keterkaitan dengan program serta pihak provider. Bukan hanya itu, kementerian komunikasi dan informasi melaksanakan tugasnya untuk memberikan arahan pada masyarakat yang memiliki usaha penginapan dan rumah makan. Praktek kolaborasi selanjutnya ada *Trust building* yaitu membangun kepercayaan yang mana dalam jurnal penelitian ini dilakukan dengan membuat kepercayaan yang terjalin terhadap satu pihak dengan pihak yang

lain, dalam hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat desa dengan mudah untuk dipahami. *Commitment to process* dalam jurnal ini dilakukan dengan membangun sebuah komitmen dalam proses kolaborasi dilakukan dengan menyusun peraturan terkait dengan Penyedia Layanan Akses Tetap Pitalabar, serta ada pula MoU bagi penerima bantuan akses fixed broadband. *Shared understanding* dalam penelitian ini adalah pemahaman bersama antar *stakeholders* terdapat sebuah hambatan dalam tata Kelola penetrasi *fixed broadband* hal itu dikarenakan tidak adanya pemahaman yang sama antara kementerian informasi dan pihak provider yang bertugas untuk menyediakan jasa berupa akses. *Intermediate outcomes* dalam penelitian ini adalah adanya pelayanan untuk mengakses tetap pitalabar (fixed broadband) sesuai dengan keperluan dan ketersediaan teknologi untuk mendukung penetrasi dalam memberikan pelayanan pada akses pitalabar dengan penggunaan teknologi jaringan *fiber optic* ataupun lainnya.

Sedangkan Penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Sekedang & IP, 2022) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “*Collaborative Governance* dalam Peningkatan Kemampuan Literasi Informasi Masyarakat Kawasan Pedesaan (Studi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul)”. Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to face dialogue* Dimana dalam jurnal ini praktek tersebut dilakukan dengan menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan rapat koordinasi dengan tujuan pembentukan, pembinaan dan pendampingan perpustakaan desa. Praktek kolaborasi selanjutnya ada *Trust building* yang mana dalam jurnal penelitian ini dilakukan dengan melibatkan keikutsertaan Stakeholders terkait dan partisipasi masyarakat dalam mengupayakan peningkatan literasi di Kabupaten Gunungkidul. *Commitment to process* dalam jurnal ini dilakukan dengan saling membentuk strategi peningkatan literasi informasi masyarakat di Kawasan pedesaan Kabupaten Gunungkidul dengan menambah jumlah buku yang memiliki kesesuaian dengan yang dibutuhkan masyarakat, membangun tempat baca, menyediakan pelayanan perpustakaan keliling, menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk masyarakat dalam

melakukan kegiatan. *Shared understanding* dalam penelitian ini adalah para *stakeholders* terkait berkomitmen untuk terus mendukung Upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan literasi di pedesaan. *Intermediate outcomes* banyaknya strategi yang dinaungkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dengan meningkatkan koleksi buku yang dibutuhkan oleh masyarakat, membuat fasilitas membaca dalam bentuk layanan perpustakaan keliling dan menjadikan perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat sebagai tempat untuk berkegiatan serta mengadakan perlombaan yang memiliki hubungan dengan perpustakaan serta mendapatkan dorongan melalui Kerjasama yang dijalin.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Wahyu Hidayat, 2022) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Wilayah Bangka Belitung” Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *face to face dialog* yang menjelaskan bahwa tersedianya ruang untuk pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan dalam penyampaian program dan gagasan yang akan dilaksanakan bersama-sama. Dalam proses ini setiap pemangku kepentingan memberikan ide dan gagasan mengenai program yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua *trust building* yang menjelaskan bahwa setiap *stakeholders* dan masyarakat dibangun untuk meyakini partisipasi dalam membangun kolaborasi untuk tujuan bersama, dalam hal ini dilakukan dengan membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) disertai dengan pihak konsultan untuk membina dan memberikan arahan untuk para pelaku UMKM. Selanjutnya ada *commitment to process* dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat maksud baik yang saling menguntungkan antar pemangku kepentingan untuk mencapai kebijakan dan tujuan bersama yang dilakukan dengan membangun komitmen agar dapat mendampingi UMKM secara berkelanjutan bukan pada saat pelaksanaan Kegiatan pelatihan saja. Selanjutnya proses kolaborasi berupa *shared understanding* yang dimana dalam hal ini setiap pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama terkait

dengan apa yang mereka harapkan agar dapat mencapainya. Hal itu dilakukan dengan menyamakan persepsi melalui visi dan misi untuk paham dengan digital. Yang terakhir adalah *intermediate outcome* yang merupakan terwujudnya program dalam bentuk nyata melalui pengembangan momen yang bias untuk digunakan sebagai bimbingan dalam ketercapaian proses kolaboratif, keberhasilan tersebut diraih oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta hingga masyarakat dan UMKM dengan memiliki luaran berupa berhasilnya program diimplementasikan.

Penelitian terdahulu dengan topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Wanti Anggrain & Mashur, 2022) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “*Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMS)” Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to Face Dialog* yang menjelaskan adanya pertemuan tatap muka antar pemangku kepentingan yang dilakukan secara rutin hingga mengeksplorasi keuntungan bersama antar pemangku kepentingan pada pertemuan pertama dengan melakukan kegiatan pembuatan dan peresmian MoU. *Trust Building* dilakukan dengan melakukan kegiatan yang mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk melakukan pertemuan dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan sehingga dapat terbangunnya rasa percaya antar mitra untuk membentuk komunitas sebagai jembatan dan membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah terkait dengan anak terlantar. *Commitment to Process* dilakukan dengan melaksanakan kesepakatan guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan melaksanakan kerjasama untuk menangani psikologi anak di UPT Panti Sosial Kesejahteraan. *Shared Understanding* dilakukan dengan menyamakan pemahaman bersama dan tanggung jawab bersama sehingga harus mempunyai kesepahaman dengan *stakeholders* yang terlibat, pada proses ini dilakukan kegiatan berupa pemahaman kepada orang tua yang terkena permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terakhir adalah *Intermediate Outcome* yang menunjukkan hasil dari kegiatan untuk dapat dikembalikan sebagai modal pada kegiatan kolaborasi pada kegiatan selanjutnya, hal ini dilakukan dengan penanganan rehabilitasi yang

menghasilkan perubahan secara signifikan pada proses penanganan rehabilitasi terhadap anak.

Sedangkan Penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Priono & Rusli, 2023) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis *Collaborative Governance* Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru” Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to Face Dialog* dengan melakukan komunikasi menggunakan pesan untuk mencapai makna yang sama antar dua orang atau lebih dan pendengar memiliki kesempatan yang sama, dalam penelitian ini telah dijalankan namun belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan pihak yang bekerjasama tidak memiliki jadwal yang tetap melainkan kondisional. *Trust Building* didasarkan pada keterbukaan antar pemangku kepentingan yang dilandasi oleh hubungan profesional dengan mempercayakan informasi atau upaya aktor lain dalam satu tujuan untuk dicapai, pada penelitian ini dilakukan dengan membangun kepercayaan dengan pihak terkait melalui pengambilan kebijakan. *Commitment to Process* dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dengan melakukan kegiatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen dengan pemangku kepentingan agar terus berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan.

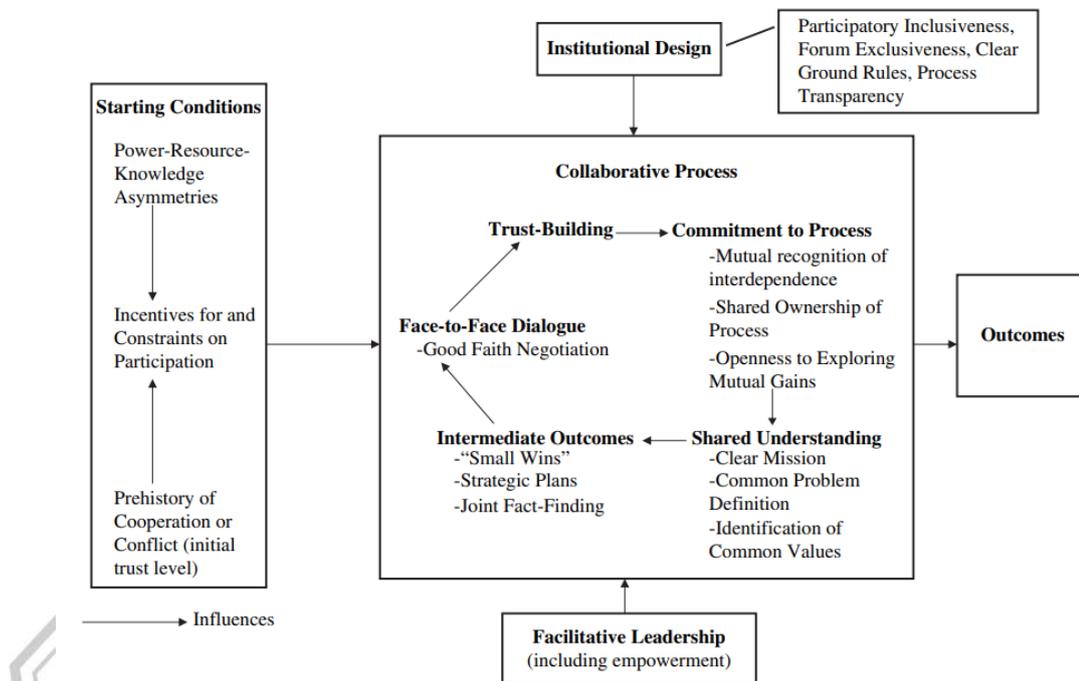
Sedangkan Penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian (Muhammad Dwi Marsianto Putra, Indah Murti, 2024) yang menggunakan teori dari Ansell and Gash mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi dari “Analisis *Collaborative Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Lontong Balap Di Dispendukcapil Kota Surabaya” Menurut teori kolaborasi terdapat proses praktek kolaborasi yang terdiri dari *Face to Face Dialog* yang merupakan proses berkoordinasi secara tatap muka bertemu langsung dari beberapa pihak untuk berkolaborasi pada pengguna layanan program Lontong Balap, kegiatan itu dilakukan pada saat sidang lontong balap bersama dengan pihak Dispendukcapil Kota Surabaya. *Trust Building* merupakan upaya dibangunnya rasa percaya masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melewati proses pertemuan pada rapat membahas evaluasi program yang telah dilaksanakan. *Commitment to Process* dalam hal ini merupakan komitmen terhadap proses yang telah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan informasi secara terbuka, jujur dan adil dalam setiap prosesnya. *Shared Understanding* dilakukan dengan saling memahami yang terjadi karena banyak pihak yang berkolaborasi dan bertanggung jawab dengan baik dan mudah untuk dipahami. *Intermediate Outcome* terdapat hasil sementara berupa keberhasilan menjalankan program yang dilihat melalui kolaborasi program dengan para pihak terkait walaupun terdapat kekurangan tetapi masih diatasi agar semua masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan program. *Shared Understanding* dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa mitra untuk menumbuhkan pemahaman yang khas mengenai apa yang akan dicapai secara bersama, hal ini dilakukan dalam penelitian melalui pemberian pemahaman bersama mengenai pengembangan wisata Kampung Bandar yang nantinya bisa untuk membantu perekonomian masyarakat.

2.1.1 Definisi Tata Kelola Kolaborasi (*Collaborative Governance*)

Teori Collaborative Governance berfokus pada kebijakan dan permasalahan publik yang dimana dalam konsepnya teori ini berfokus pada isu-isu publik dan disertai dengan pemecahan masalah yang terjadi. Konsep Collaborative Governance digunakan sebagai konsep untuk melakukan Kerjasama dengan *stakeholders* dari lembaga pemerintahan dan organisasi lainnya agar dapat menjalankan program lembaga pemerintahan (Bila & Saputra, 2019). Kolaborasi dalam konsep ini memiliki makna sebagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan Kerjasama dan melakukan kompromi bersama dengan stakeholder terkait, sehingga dapat langsung merasakan akibat dan manfaat dari Kerjasama yang telah terjalin. Dalam pemerintahan, tata Kelola terdapat tiga aktor yang memiliki pengaruh yang cukup kuat pada pelaksanaan Kerjasama antara lain Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Fawwaz Aldi Tilano, 2012).

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Ansell and gash



Sumber : (Ansell & Gash, 2008)

Menurut Ansell & Gash *Collaborative Governance* merupakan serangkaian tata cara yang mana telah dilibatkan secara langsung pemangku kepentingan baik swasta ataupun pemerintah pada tahapan membuat kebijakan yang formal. Selain melibatkan lembaga publik yang lain juga berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan publik dalam mengatur program dari pemerintah untuk kebutuhan publik. Ansell & Gash juga berpendapat bahwa *Collaborative Governance* sebuah proses dari Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode kolaborasi dengan membuat sebuah keputusan pada proses kebijakan dimana hal tersebut digunakan oleh organisasi dan pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung.

maksud dari adanya kolaborasi agar dapat menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang terjadi di publik. *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash berawal dari sebuah kolaborasi yang diakibatkan oleh kejadian, dengan para pemangku kepentingan yang mempunyai target capaian pada kebutuhan dan tujuan, terdapat Kerjasama yang terjalin di masa lalu, saling menghormati terhadap

Kerjasama yang telah terjalin, menjaga kepercayaan pada setiap stakeholders, tidak adanya keseimbangan kekuatan terhadap sumber daya dan pengetahuan.

2.1.2 Model Tata Kelola Kolaboratif oleh Ansell dan Gash

2.1.2.1 Kondisi Awal

Proses tahapan pertama pada kolaborasi ini dapat menjadikan penghambat ataupun pendukung dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kondisi awal yang dijelaskan dalam teori kolaboratif Ansell and Gash bahwa pada kondisi awal dalam kolaborasi terdapat sebuah fasilitasi ataupun penghambat dalam pelaksanaan Kerjasama antara pemangku kepentingan antar lembaga terkait. Namun pada sisi yang lainnya sebagai pemangku kepentingan mempunyai tujuan secara bersamaan terkait dengan harapan dari masing-masing pemangku kepentingan untuk dicapai yang dilakukan melalui proses kolaborasi yang saling menghormati satu sama lain. Kondisi awal terdapat tiga kategori yaitu:

1. Ketidakseimbangan Sumber Daya

Kekuasaan yang tidak seimbang pada pemangku kepentingan merupakan problematika yang dapat terjadi kapan saja dalam proses kolaborasi. Jika para pemangku kepentingan belum memiliki kemampuan, kelompok, identitas ataupun sumberdaya yang cukup untuk berpartisipasi dalam Kegiatan kolaborasi antar lembaga, maka proses tata Kelola kolaboratif mudah untuk dicurangi oleh pihak yang memiliki kekuasaan unggul. Pada akhirnya Kegiatan kolaborasi akan tidak terjadi secara seimbang dan tidak akan menghasilkan sebuah kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan.

Masalah terkait dengan ketimpangan kekuasaan tersebut menjadi masalah apabila pemangku kepentingan tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk mewakili tahapan tata Kelola kolaborasi. Banyak kasus yang sering mengakibatkan terjadinya ketimpangan adalah tidak adanya kelompok pemangku kepentingan

yang terorganisasi secara kolektif, tidak mempunyai kemampuan serta dan keahlian untuk melibatkan dirinya pada forum diskusi terkait dengan permasalahan teknis. Selain itu pemangku kepentingan terkadang juga tidak mempunyai waktu dan energi serta keleluasaan untuk turut melibatkan dirinya pada tahapan kolaboratif yang dalam kegiatannya cukup memakan waktu.

2. Intensif untuk berpartisipasi

Partisipasi dalam kolaborasi sangat penting dan memiliki karakter berupa kemauan sendiri, oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang cukup dalam bagi para pemangku kepentingan yang terlibat pada proses Kegiatan kolaborasi dalam lembaga. Proses kolaborasi seringkali tidak berjalan dengan baik menurut pakar tata Kelola kolaborasi yang mana hal tersebut disebabkan karena tidak adanya keseimbangan kekuasaan dalam sumber daya, sehingga berdampak pada pasrtisipasi pemangku kepentingan. Intensif partisipasi dari pemangku kepentingan terhadap proses tata Kelola kolaborasi memang menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya

3. Prasejarah Kerjasama atau konflik

Tata Kelola kolaborasi yang terjadi antar pemangku kepentingan dapat mengalami hambatan apabila para pemangku kepentingan saling memiliki sifat yang antagonisme. Namun, dikarenakan para pemangku kepentingan saling bergantung maka Tingkat kolaborasi yang tinggi akan tercipta dengan insentif yang kuat. Kolaborasi menurut weber berasal dari kelelahan dan frustrasi yang terjadi secara terus menerus berjuang mengenai disposisi sumber daya. Oleh karena itu tingginya permasalahan tidak menjadikan hambatan dalam tahapan kolaborasi. Tetapi, Tata Kelola kolaboratif sering kali dibangun atas dasar dendam yang telah melembagakan psikologi sosial yang memiliki sifat antagonis. Prasejarah konflik kemungkinan besar akan tercermin dalam rendahnya kualitas kepercayaan, rendahnya komitmen, adanya

tindakan manipulatif dan komunikasi yang tidak terjalin sesuai dengan fakta.

Oleh sebab itu dalam kolaborasi para ahli menyarankan kemungkinan keberhasilan Kerjasama yang terjalin antar *stakeholders* agar terhindar dari konflik kolaborasi dengan beberapa cara seperti apabila terdapat Riwayat antagonisme diantara *stakeholders*, maka tata Kelola kolaboratif tidak akan berhasil kecuali terdapat Tingkat saling bergantung yang tinggi di antara pemangku kepentingan. Selain itu pemangku kepentingan mengambil Langkah positif untuk memulihkan rendahnya Tingkat kepercayaan dan modal sosial antara pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

2.1.2.2 Desain Kelembagaan

merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi yang menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan karena dalam proses berjalannya kolaborasi terdapat legitimasi yang dapat menekankan aturan dalam melakukan partisipasi dalam forum yang berbentuk aturan peraturan secara terbuka. Luasnya partisipasi yang dijalin pada saat pelaksanaan kolaborasi rasa toleransi harus tetap diupayakan secara aktif karena apabila dalam proses pelaksanaan kolaborasi ditemukan kesuksesan maka hal tersebut menaruh perhatian besar pada partisipasi par pemangku kepentingan dan adanya pengecualian terhadap pemangku kepentingan adalah alasan utama dari sebuah kegagalan.

Hal diatas merupakan ini dari proses legitimasi yang didasarkan pada kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk melakukan diskusi dengan pihak terkait lainnya terkait dengan hasil kebijakan, melakukan konfirmasi bahwa hasil dari kebijakan mewakili consensus yang luas. oleh karena itu kepemimpinan yang lemah atau tidak inklusif dapat melemahkan legitimasi hasil kolaborasi. Sehingga strategi proaktif untuk memobilisasi pemangku kepentingan yang kurang terwakilli sering kali dianggap penting (Ansell & Gash, 2008).

2.1.2.3 Kepemimpinan Fasilitatif

konflik yang terjadi dalam suatu kolaborasi sangat mungkin terjadi yang disebabkan karena adanya perselisihan dan ketidakpercayaan yang terjadi. Kepemimpinan, *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash menganut sistem kepemimpinan fasilitatif yang artinya berkaitan dengan kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan stakeholders yang terlibat, aturan yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memberikan fasilitas untuk berdialog antar stakeholders dan membagi keuntungan secara bersamaan. Tata cara dan peraturan dasar memiliki pengaruh dalam desain institusional dalam kolaborasi sebagai procedural dari adanya proses kolaborasi yang resmi atau legal, selain itu proses transparansi, inklusivitas partisipan dan eksklusivitas dari forum juga menjadi salah satu pengaruh yang penting (Ansell & Gash, 2008).

Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, sebagai seorang pemimpin dalam memimpin Kegiatan kolaboratif harus memiliki keterampilan untuk mendorong partisipasi yang luas dan aktif, memastikan pengaruh dan control yang berasal dari pihak mana saja, memberikan fasilitas dalam berdinamika pada kelompok produktif dan memperluas cakupan proses dari kolaborasi. Kolaborasi dengan pemimpin yang baik juga penting untuk memberdayakan dan mewakili pemangku kepentingan yang lemah. Ketika insentif untuk berpartisipasi lemah, maka kekuasaan dan sumber daya terdistribusi secara asimetris dan antagonisme yang tinggi. Namun apabila insentif tersebut lemah maka pemimpin harus sering melakukan intervensi untuk membantu menjaga para pemangku kepentingan untuk terus ikut serta pada Kegiatan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).

2.1.3 Proses Kolaborasi

Model proses tata Kelola kolaborasi seringkali tergambarkan sebagai pengembangan yang dilakukan secara bertahap seperti contohnya pada penjelasan proses Pembangunan consensus yang

memiliki fase pranegosiasi, fase negosiasi dan fase implementasi. Namun dari banyaknya literatur dijelaskan bahwa proses kolaborasi berpacu terhadap pencapaian siklus, baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dan hasil dari kolaborasi tersebut. Adapun proses kolaborasi menurut Ansell and Gash terdapat 5 (lima) tahapan yaitu :

2.1.3.1 Dialog Tatap Muka (*face to face dialogue*)

Kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan didasarkan pada komunikasi. Hal itu merupakan hal yang paling mungkin untuk dilakukan dan diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan identifikasi secara berlanjut terhadap peluang demi mendapatkan keuntungan bersama. Proses berdialog dengan tatap muka secara langsung juga salah satu usaha untuk membangun kepercayaan antar satu dengan yang lain. Berdialog tatap muka memang menjadi syarat yang sangat diperlukan dalam Kegiatan kolaborasi, namun belum terlalu cukup untuk mewujudkan kolaborasi yang baik. Dialog tatap muka hanya dapat memperkuat perbedaan pemikiran satu sama lain. Proses kolaborasi pada dialog tatap muka ini terdapat item yaitu Perundingan baik yang dimana dalam item ini merundingkan maksud dari setiap pemangku kepentingan pada sebuah perjanjian dan didasarkan dengan kejujuran antara satu dengan yang lain (Ansell & Gash, 2008).

2.1.3.2 Membangun Kepercayaan (*trust building*)

Kurangnya kepercayaan terhadap seseorang sangat wajar pada umumnya khususnya terhadap pemangku kepentingan pada tahap awal dalam melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Literatur mengenai kolaboratif sangat menyarankan juga apabila kepercayaan terbangun satu sama lain antar pemangku kepentingan. Kepercayaan dalam sebuah organisasi yang melakukan kolaborasi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan dan menguntungkan satu sama lain harus terlihat menonjol. Namun bukan berarti membangun kepercayaan adalah fase yang terpisah dari dialog dan negosiasi mengenai permasalahan yang

terjadi di lapangan. Namun para pemangku kepentingan harus mampu dalam mengambil risiko adanya manipulasi dengan disertai bukti dalam kasus atau kejadian. Sehingga jika peristiwa itu bertentangan dengan kebijakan maka pemangku kepentingan harus mengalokasikan waktu untuk menumbuhkan kepercayaan (Ansell & Gash, 2008).

2.1.3.3 Komitmen Terhadap Proses (*commitment to process*)

Komitmen dalam kolaborasi adalah salah satu faktor terpenting dan lemahnya komitmen dari lembaga publik terhadap kolaborasi khususnya Tingkat pusat seringkali dipandang sebagai masalah khusus dalam hal komitmen. Namun *Stakeholders* sebetulnya berkeinginan untuk turut serta pada berbagai perspektif dari berbagai pihak tidak diabaikan untuk mendapatkan legitimasi atas posisi mereka guna kewajiban hukum terpenuhi. Sebaliknya dalam komitmen terhadap proses yang mana artinya adalah mengembangkan keyakinan bahwa terjadinya tawar-menawar dengan sikap yang baik untuk membangun komitmen yang baik dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam Kegiatan kolaborasi.

Setelah adanya musyawarah yang terjadi antar pemangku kepentingan tentu saja hasilnya tidak sepenuhnya mengarah pada dukungan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu komitmen dalam proses kolaborasi sangat bergantung pada kepercayaan maka yang lainnya akan juga menghormati setiap perspektif yang disampaikan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Pemangku juga harus memastikan bahwa negosiasi yang dibahas pada musyawarah harus memiliki integritas. Adapun item dalam proses kolaborasi ini yang pertama adalah saling mengakui ketergantungan yang berarti terdapat prinsip pada pemangku kepentingan untuk tidak bertindak mandiri. Kedua berbagi kepemilikan proses hal tersebut dimaksud dalam proses kolaborasi yang terjadi antar pemangku kepentingan harus saling berbagi pemikiran untuk dapat memutuskan kebijakan yang tepat. Ketiga dalam item ini adalah keterbukaan antar stakeholders untuk mengeksplorasi keuntungan bersama, mhal itu

ditekankan pada pentingnya setiap individu tau setiap pemangku kepentingan untuk selalu terbuka dan didukung dengan adanya ide baru (Ansell & Gash, 2008).

2.1.3.4 Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama dari berbagai literatur diartikan sebagai misi yang digunakan secara bersama. Pada proses kolaborasi pemahaman bersama ini pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatannya harus saling memiliki kesamaan antar satu sama lain baik itu tentang pola pikir dan persepsi setelah diadakannya penawaran dan lain sebagainya. Selain itu para pemangku kepentingan juga disarankan mempunyai tujuan yang sama dalam hal yang akan dicapai untuk keberhasilan dan masing-masing saling mendapatkan keuntungan, tidak hanya itu pemangku kepentingan juga harus memahami ideologi bersama agar mengetahui tujuan yang jelas dari sebuah Kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Perkembangan pemahaman secara bersama bisa untuk dilihat melalui tahapan pembelajaran kolaborasi yang lebih luas dan dikembangkan strategi survei yang bermanfaat untuk menilai kolaborasi dengan menghasilkan hasil yang kolektif. Adapun item yang terdapat pada proses kolaborasi berupa Misi yang Jelas bertujuan untuk memperkuat manajemen dan komitmen dari tim untuk mencapai tujuan bersama dalam mengambil Keputusan. Kemudian definisi masalah umum yang bertujuan untuk konsisten dalam komitmen yang telah dibangun pada saat dihadapkan pada tantangan yang dihadapi. Selanjutnya ada identifikasi nilai umum yang bertujuan untuk memberikan fasilitasi dan pembelajaran yang efektif. Hasil menengah yang berisikan adanya kolaborasi telah berhasil dicapai sesuai dengan yang diharapkan satu sama lain berupa Kemenangan kecil, serta dapat juga berupa masukan untuk keberlanjutan kolaborasi berupa rencana strategi dan penemuan fakta baru (Ansell & Gash, 2008).

2.2 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) adalah salah satu pendekatan untuk memberikan pelayanan dalam bidang perpustakaan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat dalam penggunaan perpustakaan. Transformasi perpustakaan ini mensyaratkan kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah lainnya untuk berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia. Fasilitas yang ada dalam Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial memberikan wadah untuk Masyarakat dalam mengembangkan potensi dengan melihat keragaman budaya, kemauan menerima perubahan yang akan memberikan dampak yang baik pada kehidupan Masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berusaha melindungi dan memperjuangkan budaya Hak Asasi Manusia (HAM) (Perpusnas, 2021). Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) juga menjadi salah satu indikator dalam pengukuran IPLM yang mana indeks literasi perlu untuk diketahui sebagai penilaian atas usaha kinerja yang dilakukan oleh setiap lembaga.

Adapun kriteria perpustakaan yang dapat menerima dan menjalankan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu perpustakaan didirikan secara legal, memiliki struktur Lembaga organisasi jelas, terdapat sarana berupa ruangan serta jaringan listrik, memiliki lokasi yang mudah untuk dilintasi jalur internet dan memiliki komitmen pada penyelenggaraan program. Hal itu dikarenakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ini memiliki sasaran utama pada lingkup perpustakaan umum. Tujuan dari adanya program ini mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perpustakaan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama dan suku pada saat pembelajaran nantinya. Mengingat program ini dari perpustakaan nasional sehingga hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian perpustakaan terhadap Pembangunan Indonesia berkelanjutan dan memberikan pelayanan inklusif yang mana penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang perpustakaan (Enlevi & Masruri, 2023).

2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui ketercapaian unsur dari IPLM itu sendiri. Adapun 7 unsur ketercapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan Masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan yang telah dibina sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Adanya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, Anggota perpustakaan.

Pada unsur yang tertulis di atas telah disesuaikan dengan standarisasi dari perpustakaan nasional. Sehingga pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dihitung dengan mengacu pada 7 unsur IPLM tersebut. Selain itu IPLM juga memiliki korelasi dengan perencanaan daerah. Hal itu dikarenakan pengukuran juga dapat dilakukan secara mandiri pada setiap Kabupaten atau Kota di setiap provinsi dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator korelasi dengan perencanaan daerah seperti Kerjasama dalam peningkatan kegemaran membaca dan literasi, Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi, Pemanfaatan koleksi digital oleh masyarakat, Penyusunan data informasi perpustakaan, Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.